



Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Padang oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar

Vina Kurnia Maharani¹, Al Rafni^{2*}, Suryanef³, Fatmariza⁴

^{1,2,3,4}Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^{2*} alrafni@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received 26th February 2024

Revised 4th March 2024

Accepted 25th June 2024

Keywords:

KPPG

Golkar Women's

Representation

Padang

ABSTRACT

This article aims to examine the efforts of the Women's Unity of the Golkar Party (KPPG) in enhancing women's representation in the legislative body through the recruitment process of prospective legislative candidates in the 2019 elections in Padang City. Employing a qualitative descriptive method, data collection was carried out through interviews and document analysis, while the validity of the data was tested using source triangulation by comparing interview results with documentary evidence from various relevant sources. The data analysis followed three key steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that KPPG's efforts include: a) engaging in social services and community activities, b) providing political education through seminars, c) conducting orientation training for cadre members, d) organizing training of trainers, and e) offering campaigner training. However, KPPG faces several obstacles in increasing women's representation, including: a) the entrenched patriarchal culture in the Minangkabau community, b) lack of support or permission from husbands within the family environment, c) low interest among women in participating in politics, and d) financial limitations, where some potential candidates are unwilling to bear the costs required for candidacy.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Al Rafni

Departemen Ilmu Sosial Politik

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

alrafni@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Keberadaan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat membuka peluang bagi perempuan untuk berkontestasi dalam politik. Hal ini sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 172 yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus berafiliasi dengan partai politik. Sehingga dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU, baik secara lisan maupun tertulis. Keterwakilan perempuan di bidang politik, mencakup: (a) keterwakilan ide/gagasan (b) keterwakilan keberadaan (eksistensi) meliputi dua aspek yaitu: (i) Tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; dan (ii) Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri (Partini, 2015).

Pengakuan terhadap hak politik perempuan ini dimulai pada UU No 68 tahun 1958 dimana pemerintah menyetujui konvensi hak politik wanita. Hal ini merupakan upaya mendorong peran perempuan dalam politik Indonesia (Prihatini, 2020). Namun, momentum signifikan terjadi setelah UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2) mengalami revisi. Dalam UU ini ditegaskan kembali hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan istimewa guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 2 tahun 2011 menyoroti perlunya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan menetapkan persyaratan minimal tiga puluh persen (30%) dalam AD/ART masing-masing.

Pemilihan tersebut mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kota atau kabupaten. Pada Pemilu tahun 2019, elektabilitas perempuan di tiga daerah pemilihan untuk DPRD Medan dipengaruhi oleh: jenis kelamin, suku dan penampilan fisik (Rahayu, S. 2001). Namun tantangan yang dihadapi oleh perempuan juga tidak kalah banyaknya, diantaranya: kultur masyarakat di Indonesia yang masih lekat dengan budaya patriarki, sikap mayoritas kaum laki-laki yang masih sering meremehkan perempuan sekaligus tendensi elit partai yang cenderung tidak mengedepankan keterbukaan atas peran perempuan (Wahyudi, V, 2018:2). Selain itu, faktor patronasi politik juga masih menjadi faktor penghalang yang kuat untuk membuat perempuan masuk ke dalam politik (Sindi Oktavira, 2023).

Pada Pemilu 2019, beberapa partai politik di Indonesia telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Tren ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Namun, meskipun partai-partai telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam daftar calon, angka keterpilihan perempuan masih jauh dari angka ideal 30 persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah rendahnya prioritas caleg perempuan dalam penempatan nomor urut atas, yang memengaruhi peluang keterpilihan mereka (Ramadhany, D, 2020). Beberapa partai yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan adalah : PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PKS dan Partai Demokrat.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) adalah organisasi sayap Partai Golkar yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam politik dan masyarakat. Didirikan untuk mendukung visi partai, KPPG berperan aktif dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di berbagai level pemerintahan dan politik, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan. KPPG juga terlibat dalam kegiatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta advokasi isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, keluarga, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan peran strategis perempuan di panggung politik Indonesia.

Ketua KPPG Golkar Kota Padang melakukan beberapa upaya untuk memenuhi keterwakilan perempuan, diantaranya: bakti sosial, seminar pendidikan politik, diklat orientasi pengkaderan dan menjalin kerjasama dengan sayap spesifik dari pihak perempuan di parpol lain. Namun terdapat faktor penghambat atas upaya KPPG ini, diantaranya: struktur partai Golkar yang didominasi oleh laki-laki serta motivasi dan kapabilitas kader pihak perempuan yang tidak sejalan dengan tujuan KPPG.

Berdasarkan permasalahan di atas, meskipun partai politik telah membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan karier, partai tersebut belum secara jelas menyediakan jalur bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis atau berperan signifikan dalam dunia politik. Fenomena seperti ini juga ditemukan di berbagai Negara di dunia, seperti di India yang melakukan proses rekrutmen kader yang tipikal untuk kader laki-laki dan perempuan berdasarkan ideologi masing-masing partai (Soedarwo, 2020). Artikel ini akan membahas upaya yang dilakukan oleh KPPG Kota Padang dalam meningkatkan kuota 30% calon legislatif perempuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2019) dimana peneliti berusaha memahami makna yang dihasilkan dari pengalaman partisipan dalam konteks tertentu. Lokasi penelitian adalah di Sekretariat Partai Golkar Kota Padang, yang terletak di Jl. Kp Nias V No.8 Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Sekretaris KPPG Kota Padang sebagai informan kunci. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dan analisis data dilakukan melalui langkah-langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPPG Kota Padang sebagai sayap partai memainkan peran yang sangat penting dalam proses penyeleksian calon legislatif perempuan. Hal ini diperkuat oleh Surat Instruksi No. 39/DPP/GOLKAR/XI/2021 yang mengatur penyusunan fungsionaris Partai Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adapun mekanisme rekrutmen politik dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KPPG mengacu pada surat ini adalah:

a. Penetapan bakal calon fungsionaris

KPPG berperan menjaring perempuan calon legislatif untuk partai Golkar dengan menggunakan prosedur semi-terbuka. Kebijakan rekrutmen calon legislatif oleh Partai Golkar lebih mengedepankan internalisasi dengan memberikan prioritas kepada kader partai yang berasal dari pengurus dan sayap partai. Namun, masyarakat umum juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan. KPPG melakukan pencarian fungsionaris perempuan dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah kursi perempuan di DPRD. Proses penjaringan ini dimulai dengan mengajak anggota KPPG Kabupaten/Kota untuk mendaftar sebagai caleg di tingkat Provinsi. Jika fungsionaris dari KPPG belum memenuhi kuota yaitu sebanyak 54 orang, maka KPPG melakukan penjaringan luar partai.

b. Penugasan bakal calon fungsionaris

Setelah ditetapkan menjadi bakal calon fungsionaris maka tahap selanjutnya adalah penugasan. Penugasan fungsionaris merupakan penilaian terhadap proses seleksi akhir penetapan calon anggota DPRD. Para fungsionaris akan diberi tugas untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat guna mengevaluasi kemampuan mereka dalam berintegrasi dengan masyarakat serta membuktikan komitmen mereka terhadap partai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon fungsionaris mampu berperan aktif dan setia kepada partai, sekaligus memenuhi standar prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan integritas.

c. Evaluasi penugasan bakal calon fungsionaris

Evaluasi terhadap penugasan bakal calon fungsionaris perempuan dilakukan dengan tujuan: meningkatkan prestasi calon, mendorong kontribusi aktif, mengokohkan integrasi partai, memajukan kaderisasi, serta mendorong program-program yang bermanfaat di wilayah tugas mereka. Evaluasi mencakup aspek pengabdian, aspek elektabilitas dan aspek pendidikan. Berikut ditampilkan data perbandingan anggota perempuan di DPRD Kota Padang, untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024, di bawah:

Tabel 1. 1 Data Perbandingan Anggota Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 dan 2019-2024

Periode 2014-2019				Periode 2019-2024			
No	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil	No	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil
1	Gustin Pramona, S.Pt	Demokrat	I	1	Salisma, SH	Demokrat	II
2	Mailinda Rose, SE	Nasdem	I	2	Irawati Meuraksa, SP	PAN	IV
3	Dian Anggraini Octavia, S.Sos, M.Si	Nasdem	II	3	Yuhilda Darwis, SE	PPP	I
4	Dewi Susanti	Gerindra	III	4	Elly Thrisyanti, SE, Akt	Gerindra	III
5	Elly Thriyanti, SE, Akt	Gerindra	III	5	Dewi Susanti	Gerindra	III
6	Yuhilda Darwis, SE	PPP	I	6	Nila Kartika, A.Md	Demokrat	III
7	Nila Kartika, A.Md	PPP	III				

Sumber :Diolah oleh peneliti, 2023.

d. Daftar calon sementara

Penyusunan daftar calon sementara untuk menetapkan 30% fungsionaris perempuan ditangani oleh tim sinkronisasi. Tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPD partai Golkar. Turut serta juga di dalamnya: wakil ketua dari bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, tim pemenang pemilu dan wakil sekretaris bidang kemenangan pemilu. Tim

sinkronisasi memiliki wewenang dalam menyeleksi fungsionaris partai Golkar yang akan diusulkan pada pemilu legislatif. Tim sinkronisasi memerintahkan fungsionaris untuk turun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk melaksanakan program dan mempromosikan program. Tim ini juga memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program organisasi di wilayah tugas mereka.

e. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader

Beberapa aktivitas yang dilakukan untuk menjaring perempuan caleg partai Golkar diantaranya adalah ikut serta dalam kegiatan sosial dan terlibat aktif dalam aktivitas komunitas. KPPG juga mengadakan seminar pendidikan politik dan kunjungan studi yang bertujuan sebagai wadah pembelajaran politik bagi perempuan dan memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa proses rekrutmen dalam partai politik, harus mencakup di dalamnya bagaimana sistem pemilu dan sistem kepartaian (Katz, 2006). Partai juga harus memperhatikan sistem hukum yang mengatur tentang batasan usia caleg. Partai politik yang tidak memiliki kuota 30% keterwakilan perempuan akan gagal menjadi kandidat peserta pemilu pada daerah pemilihan.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, seperti DPR RI, upaya internal yang dilakukan oleh KPPG, yaitu: melakukan peningkatan kualitas kader perempuan dengan mengadakan sekolah politik perempuan, Rapat Kerja Teknis (Rakernis), rekrutmen caleg perempuan, mengawal nomor urut bagi caleg perempuan, konsolidasi nasional, bantuan fasilitas kampanye, pemberian dukungan finansial melalui penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi caleg perempuan sejak masa kampanye hingga ditetapkannya hasil pemilu, dan membentuk Tim Saksi KPPG di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Lutfiyah, J, 2019).

KPPG dapat memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, sehingga partai Golkar bisa maju sebagai peserta kandidat peserta pemilu. Di Indonesia sistem pemilu yang berlaku adalah multi partai dimana memberikan kesempatan semua partai untuk menduduki posisi caleg perempuannya di dalam parlemen.

Sistem rekrutmen caleg perempuan juga dilakukan secara internal, yaitu: mengikutsertakan laskar sayap perempuan di setiap ormas hasta karya. Proses selanjutnya, KPPG menuliskan bakal calon-calon legislatif perempuan yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPD Partai Golkar untuk dimintai persetujuannya.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah jenis masyarakat yang akan memilih kandidat. Pertimbangan ini akan menentukan kriteria yang diperlukan oleh partai politik. Misalnya, partai dapat merekomendasikan pengusaha sebagai kriteria peserta kandidat. Partai Golkar sendiri dalam merekrut caleg perempuan melihat prestasi dan rekam jejak yang dimiliki bakal caleg. KPPG akan melihat prestasi dalam bidang politik, sosial, dan bidang lain yang dikuasai oleh bakal caleg perempuan. Selain itu, KPPG melihat dedikasi, loyalitas dan sikap yang dimiliki bakal caleg.

Kandidat juga harus memiliki motivasi serta modal politik tersendiri, misal: relasi politik, pengalaman dan kemampuan dalam bidang legislatif. Hal ini berguna untuk membantu dan mendorong terlaksananya program partai dan diharapkan dapat menangani tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kandidat harus memperkuat basis dukungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang peta politik daerah pemilihannya. Selain itu, kestabilan finansial dan latar belakang pendidikan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan kandidat.

Faktor penghambat KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris KPPG, kader perempuan Partai Golkar diharapkan menjadi pemimpin yang tangguh, mampu melukiskan aspirasi rakyat, dan sekaligus menanamkan suasana politik yang kaya dengan nilai-nilai feminisme, etiket, serta anti kekerasan.

Vina Kurnia Maharani, Al Rafni, Suryanef, Fatmariza. *Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Padang oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar*

Kegiatan yang dilakukan oleh KPPG untuk mencapai tujuan ini adalah: mengadakan pelatihan orientasi pengkaderan, Training of Trainer (ToT) Partai Golkar, dan pelatihan juru kampanye. Berbagai kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan interpretasi tentang gagasan kebangsaan dan arah kebijakan partai serta menanamkan kesadaran bersama akan misi khusus yang diemban oleh perempuan Partai Golkar.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif. Hal ini tentunya berkaitan dengan sejumlah isu kompleks. Partai politik, sebagai wadah untuk merekrut pemimpin politik, memainkan peran sentral dalam proses seleksi kepemimpinan, baik dalam skala internal partai maupun nasional. Kendala internal yang dihadapi oleh KPPG adalah: kurangnya minat dari beberapa pengurus partai dan anggota KPPG untuk mencalonkan diri. Beberapa diantara mereka bergabung dalam partai dengan motivasi yang lebih bersifat sosial, atau hanya ingin berkontribusi sebagai pengurus partai tanpa memiliki minat untuk terlibat dalam dunia legislatif.

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh KPPG yaitu ketertarikan perempuan untuk bergabung ke dalam partai itu sangat sedikit. Beberapa perempuan yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa mereka tidak mau bergabung ke dalam partai karena berpikir percuma mencalonkan diri nanti juga tidak akan duduk. Namun, ada juga yang bersedia mencalonkan diri menjadi caleg, tetapi enggan untuk mengeluarkan biaya dalam melengkapi persyaratannya. Pada akhirnya, partai yang membiayai persyaratan tersebut karena partai membutuhkan kandidat perempuan untuk diusulkan menjadi calon legislatif.

Untuk wilayah Sumatera Barat dan khususnya, minangkabau, masyarakat masih menganut budaya patriaki. Budaya ini melihat bahwa perempuan tidak pantas berada di ruang publik dan hanya mengurus rumah tangga saja. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak dibolehkan oleh keluarga dan suaminya untuk bergabung di dunia politik. Beberapa perempuan yang sudah duduk di legislatif mengakui bahwa mereka hanya ingin menambah pergaulan saja.

KESIMPULAN

KPPG telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keterpilihan calon legislatif perempuan. Organisasi ini berperan dalam membimbing, mengarahkan, dan mendampingi calon legislatif perempuan selama proses pencalonan hingga penetapan hasil pemilu. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti bakti sosial, seminar pendidikan politik, studi banding, diklat orientasi kaderisasi, training of trainers Partai Golkar, serta pelatihan juru kampanye.

Namun, dalam pelaksanaannya, KPPG masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa faktor penghambatnya meliputi budaya patriarki yang masih kuat di Sumatera Barat, rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, serta keterbatasan finansial.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk upaya mendorong partisipasi perempuan dalam politik melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesadaran gender. Selain itu, penelitian mengenai dampak jangka panjang dari program-program KPPG terhadap keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

REFERENSI

- Katz, R. S., & Crotty, W. J. (Eds.). (2006). *Handbook of party politics*. Sage.
- Lutfiyah, J. Perempuan Dan Politik Upaya Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dalam Peningkatan Keterpilihan Perempuan Partai Golkar Di DPR RI Pada Pemilu Legislatif 2019 (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Moleong, L.J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prihatini, E. S. (2020). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 16(3), 637-659.
- Partini, P. (2015). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 39-52.
- Rahayu, S., Nasution, A., & Saleh, A. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterpilihan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 424-440.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62.
- Sindi Oktavira, & Lince Magriasti. (2023). The Role Of Golkar Party Women Units (Kppg) In The Political Recruitment Of Women Legislative Candidates: Peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Dalam Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan. *SOSIOEDUKASI : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(1), 1-8. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v12i1.1799>
- Soedarwo, V. S. D., Zuriah, N., Yumitro, G., & Jha, G. K. (2020). Pendidikan Politik Berbasis Sensitivitas Gender dalam Partai Politik di Indonesia dan India. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol, 5(1).
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.